

I. DESKRIPSI KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

1. Sasaran dan Lingkup Kegiatan : Audit dalam rangka verifikasi legalitas kayu (awal) pada IPK PT. Berau Silva Kencana Tahun 2016 seluas ± 1.360,4 Ha yang terletak di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2. SK IPK : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 01/KPTS-IPIK/DPKPP-III/II/2016 tanggal 09 Februari 2016
3. Waktu Pelaksanaan : 16 - 19 Maret 2016
4. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut
5. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
6. Acuan yang digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
7. *Management Representatif* : Mohammad Syafri

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT. Berau Silva Kencana
2. Alamat Kantor : Jl. Markisa No. 48 Kota Samarinda
3. Direktur Utama : Agoes Basoeki

IV. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

A. Tahap dan Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Verifikasi Legalitas Kayu		<p>a. Publikasi rencana verifikasi legalitas kayu pada PT Berau Silva Kencana di Portal KemenLHK, SILK dan LVLK PT Trustindo Prima Karya, tanggal 04 Maret 2016</p> <p>b. Penyampaian surat pemberitahuan rencana verifikasi legalitas kayu pada PT Berau Silva Kencana kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltara, BPHP Wil. XI Samarinda, dan Dinas Kehutanan Kab. Bulungan, tanggal 08 Maret 2016</p>
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 16 Maret 2016	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja 16-19 Maret 2016	<p>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK terkait dengan audit Sertifikasi.</p> <p>b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014.</p> <p>c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</p> <p>d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan setelah izin terbiit dan menganalisis sesuai norma penilaian.</p>

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
			e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
3.	Pertemuan Penutupan	19 Maret 2016	a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan ketidaksesuaian (LKS).
III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 20 Maret - 8 April 2016	a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasi oleh Auditor. b. Penyusunan laporan hasil VLK pada IPK PT Berau Silva Kencana.
IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 9 April 2016	a. Pemanfaatan kayu pada APL oleh PT. Berau Silva Kencana dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK pada pemegang IPK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014. b. Kepada PT. Berau Silva Kencana dapat diterbitkan S-LK.

B. Hasil Penilaian/Verifikasi

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu</p>			
<p>Kriteria 1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.</p>			
<p>1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.</p>	<p>a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.</p>
	<p>b. Peta Lampiran ILS/IPK pada areal Izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan lampirannya)</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.</p>
<p>Kriteria 1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)</p>			
<p>1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR</p>	<p>a. Izin HTHR</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)</p>
	<p>b. Peta Lampiran HTHR</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan			
1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan merupakan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status kawasan hutan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan merupakan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status kawasan hutan.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan merupakan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status kawasan hutan.
	d. Peta lampiran IPK	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan merupakan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status kawasan hutan.
	f. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan merupakan kawasan untuk kegiatan non kehutanan yang mengubah status kawasan hutan.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	IPK sama dengan pemegang izin usaha)		
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepaskan	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
	b. Peta lampiran IPK	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Kriteria 1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)			
1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	<p>a. Izin pemanfaatan kayu (IPK) pada APL berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01/KPTS/IPK/DPKKP-III/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.</p> <p>b. Lokasi IPK seluas 1.360,4 Ha sesuai dengan izin yang diberikan yaitu terletak pada APL dengan lokasi di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunas Borneo Plantation</p> <p>c. Potensi tegakan yang berada pada areal seluas tersebut terdapat dalam dokumen Laporan Hasil Cruising (5%) IPK PT. Berau Silva Kencana pada areal perkebunan Kelapa</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			<p>Sawit PT. Tunas Borneo Plantation, dengan rincian sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kel.Meranti 26.306,53 m3 - Kel. RC 3.320,98 m3. - Kel. kayu indah 314,09 m3 <p>Total: 29.942,60 m3</p>
	<p>b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Pemegang IPK tidak sama dengan pemegang izin usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang IPK: PT. Berau Silva Kencana Pemegang Izin Usaha Perkebunan: PT.Tunas Borneo Plantation.
	<p>c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. PT. Berau Silva Kencana memiliki izin IPK nomor: 01/KPTS/IPK/DPKKP-III/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, seluas: 1.360,4 Ha. dilampiri Peta skala 100.000 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Terdapat izin non kehutanan (IUP) Nomor 133/K-III/520/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Tunas Borneo Plantation dari Bupati Bulungan.</p> <p>c. Terdapat SK nomor: 522.1/05/EK/II-III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			<p>untuk Perkebunan kelapa Sawit selus 1.360,4 Ha di Desa Tanjung Palas Timur Kepasa PT. Tunas Borneo Plantation dari Bupati Bulungan.</p> <p>d. Hasil pengecekan lapangan, di batas IPK dengan titik koordinat N: 02 32' 06,2" E 117 35'35,6" menunjukkan kesesuaian lokasi.</p> <p>e. Terdapat legalitas yang sah menyangkut badan usaha yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Berau Silva Kencana nomor: 239 tanggal 31 Desember 2014 dari Notaris Achmad Dahlan, SH di Samarinda. - Akta Perubahan terakhir: Nomor 65 tanggal 18 Februari 2013 dari Kantor Notaris Wasiah, SH, SP.N di Samarinda. Pengurus: Dirut: Agoes Basoeki, Dir Hermansyah, Dir Tony Ari, Komut Farid Mansyur, Kom Aryo Wicaksono Prabowo. Terdapat Pengesahan dari Kumham nommor: AHU-000034.40.24.2014 tanggal 28 Nopember 2014. - Akta Kuasa Khusus PT. BERAU SILVA KENCANA noor 18 tanggal 7 Desember 2015 dari Kantor Notaris Khairu Subhan, SH di Samarinda. Berisi Pemberian Kuasa

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			<p>Direktur dari Tuan Agoes Basoeki kepada Tuan Kamal (khusus mengurus bidang usaha perijinan IPK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIUP nomor: 503/00833/17-01/PK/BPPTSP-C/V/2015 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tanggal 3 Mei 2015 s/d 3 Mei 2018. - TDP nomor: 17.01.1.46.02.021 tanggal 21 April 2015 s/d 31 Maret 2020 - NPWP nomor: 02435.4912722.00 a.n PT. Berau Silva Kencana alamat: Jl. Markisa nomor 48 RT 08 Gunung Kelua Samarinda Ulu Samarinda.
	d. IPK pada APL	Memenuhi	<p>IPK terdapat pada areal yang telah disetujui.</p> <p>Terdapat kelengkapan dokumen IPK, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara nomor 01/KPTS/IPK/DPKKP-III/II/2016 tanggal 9 Februari 2016. - Hasil Risalah Hutan (LHC) samplig 5%. Dileengkapi

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			<p>dengan Fakta Integritas akas kebenaran data LHC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garansi Bank DR dari BPD Kaltim Nomor: 015/BG-Pel/VA/BPDKP/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 sebesar USD \$ 117.014,00. - Garansi Bank PSDH dari BPD Kaltim nomor: 016/BG-Pel/VA/BPDKP/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 sebesar RP.528.767.000,- - Garansi Bank PNT dari BPD Kaltim Nomor : 017/BG-Pel/VA/BPDKP/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 sebesar RP.2.640.748.000,- - Daftar alat berat - Daftar Koordinat Batas - Lampiran Peta Lokasi skala 1: 100.000.
	e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Letak lokasi IPK sesuai dengan Peta lokasi. b. IPK Berau Silva Kencana memiliki lampiran Peta Lokasi dengan skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh pejabat penerbit IPK (Plt. Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Povinsi Kalimantan Utara tanggal 9 Februari 2016. Hasil pengecekan posisi geografis pada titik koordinat N: 02 32' 06,2" E 117 35'35,6" menunjukkan kesesuaian lokasi.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	Non Applicable	Areal IPK PT. Berau Silva Kencana bukan APL untuk pemukiman transmigrasi
	b. Peta lampiran IPK	Non Applicable	
<p>Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu</p> <p>Kriteria 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.</p>			
2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT Berau Silva Kencana telah memiliki Bagan Kerja IPK yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<p>a. Terdapat Laporan Hasil Cruissing (LHC) intensitas 5% dan BAP pelaksanaan Risalah Hutan (Timber Cruising) yang ditandatangani Cruisser PT. Berau Silva Kencana (Langgeng Miharso/Reg: 0172/CANHUT/XXX/2014). Tanggal 20 Nopember 2015.</p> <p>b. Terdapat Pakta Integritas atas Kebenaran pelaksanaan Timber Cruising yang ditandatangani oleh Direktur PT. Berau Silva Kencana dan Cruiser PT. Berau Silva Kencana tanggal 20 Nopember 2015.</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<p>a. PT Berau Silva Kencana belum melakukan kegiatan produksi kayu bulat pada areal IPK.</p> <p>b. PT Berau Silva Kencana telah memiliki SDM dan Sarana yang memadai untuk kegiatan PUHH atas produksi kayu bulat hasil IPK, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Ganis PHPL PKB : <ol style="list-style-type: none"> a. Margiono, Sedang mengikuti pelatihan PKBRI di BP2HP Samarinda, b. Muhammad Yoni, sudah mengikuti penyegaran PKBRI dan masih menunggu penerbitan Kartu Ganis. c. Baru Garesi, sedang menunggu proses perpanjangan kartu Ganis PKBR. 2. Telah memiliki perangkat SIPUHH online dan operatornya.
Kriteria 2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu			
2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Non Applicable	PT. Berau Silva Kencana belum melakukan kegiatan produksi kayu sehingga belum terbit SPP PSDH/DR/PNT.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
iuran kehutanan	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Non Applicable	PT. Berau Silva Kencana belum melakukan kegiatan produksi kayu sehingga belum terbit SPP PSDH/DR/PNT.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Non Applicable	PT. Berau Silva Kencana belum melakukan kegiatan produksi kayu sehingga belum terbit SPP PSDH/DR/PNT.
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Non Applicable	PT. Berau Silva Kencana belum melakukan kegiatan produksi kayu sehingga belum melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	Non Applicable	PT. Berau Silva Kencana belum melakukan kegiatan produksi kayu sehingga belum melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu.
Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
2.3.1 Implementasi	a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Non Applicable	PT. Berau Silva Kencana belum memiliki S-LK.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal	sesuai ketentuan.		
<p>Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK</p> <p>Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>			
3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Pemegang IPK PT. Berau Silva Kencana telah memiliki Prosedur K3. Dalam dokumen SOP K3 tersebut dicantumkan tentang prosedur atau tatacara penerapan K3 pada masing-masing bagian kegiatan. Terdapat personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3.
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Terdapat daftar peralatan K3, berupa sarung tangan, masker, helmet, racun api (APAR), sepatu boot, ear plug, persediaan obat-obatan dll. Disamping itu terdapat pula alat radio komunikasi SSB di logpond dan blok sebagai alat pendukung komunikasi yang tidak terjangkau sinyal selular. Semua perlengkapan K3 tersebut masih berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan laporan kecelakaan kerja oleh Pemegang IPK PT. Berau Silva Kencana yang direkap setiap bulannya. Terdapat Personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja			
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah karyawan PT. BERAU SILVA KENCANA adalah 55 orang. pekerja/karyawan termuda bernama Musa Ageng lahir tanggal 8 Oktober tahun 1994 (22 tahun 4 bulan)


 Samarinda, 09 April 2016
 Untuk K PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification
 Ir. Kurnia
 Direktur Utama

Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 236/Dirut/010-IDN/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Kepada PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) Atas Nama PT BERAU SILVA KENCANA

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan No.: 064/PK/IPK-BSK/2016 tanggal 09 April 2016 yang menyatakan bahwa IPK PT Berau Silva Kencana pada APL Tahun 2016 seluas ± 1.360,4 Hektar berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 01/KPTS-IPK/DPKPP-III/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. Trustindo Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Berau Silva Kencana dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nomor S-LK : 233.SLK.010-IDN
- Masa Berlaku : 09 April 2016 sampai dengan 08 April 2017
- Lingkup Sertifikasi : IPK pada APL Tahun 2016 seluas ± 1.360,4 Hektar di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Borneo Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

KEDUA : Atas kepemilikan S-LK ini akan dilakukan Penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan penerbitan S-LK.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 09 April 2016

LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

Ir. Kurnia
Direktur Utama



Trustindo Certification

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 233.SLK.010-IDN

Diberikan Kepada :

PT BERAU SILVA KENCANA

Alamat :

Jl. Markisa No. 48 Kota Samarinda

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 01/KPTS-IPK/DPKKP-III/II/2016 tanggal 09 Februari 2016

yang dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPPH/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

LINGKUP SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) Tahun 2016 seluas ± 1.360,4 Hektar di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Borneo Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara



Tanggal Penetapan Awal : 09 April 2016
Berlaku Hingga : 08 April 2017


Ir. Kurnia
Direktur Utama